

32 DESA KESULITAN AIR BERSIH Pemkab Bekasi Tetapkan Darurat Kekeringan

BEKASI (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menetapkan status tanggap darurat terhadap bencana kekeringan sejak Rabu 31 Agustus 2023 silam. Kini jumlah sebaran desa terdampak kekeringan mencapai 32 desa.

Adapun 32 desa itu tersebar dari sepuluh kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Adapun bencana kekeringan yang menimpa puluhan desa ini ditengarai berdampak pada puluhan 16.999 kepala keluarga atau 66.647 jiwa.

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengajak peran seluruh masyarakat untuk memberikan kepedulian terhadap warga. Adapun salah satunya dengan mengajak seluruh instansi berkolaborasi dan membagikan atau mendistribusikan air bersih.

“Tercatat jumlah air bersih yang sudah didistribusikan untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bekasi sebanyak 1.063.600 liter,” ungkap Dani dalam keterangannya, Senin (4/9).

Dani menjelaskan bah-

wa jumlah lahan pertanian terdampak kekeringan sejauh ini mencapai 16.353 hektar. Sementara, masih terdapat 3.618 hektar lainnya yang terancam.

Terkait lahan pertanian, Pemkab Bekasi akan memberikan bantuan pompa apabila lahan pertanian masih dilewati aliran sungai. Sementara pihaknya juga akan melakukan pembersihan jika terdapat saluran yang terhambat.

“Puluhan pompa sudah kita operasikan. Kalau misalnya salurannya terhambat kita lakukan pembersihan saluran termasuk normalisasi,” ujarnya.

Dani juga meminta para petani untuk mengganti komoditas seperti palawija, tadi sudah kita berikan bantuan benih cabai dan lain sebagainya karena sudah tidak mungkin lagi mencari sumber air untuk melakukan penanaman padi,” pungkasnya. ● yan

Pemprov DKI Sediakan Zona Hijau UMKM di HBKB

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI terus berupaya menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) setiap akhir pekan. Oleh karena itu, area zona hijau bagi para pedagang UMKM Binaan Pemprov DKI telah disediakan agar para pedagang dapat berjalan dengan nyaman dan tertib saat kegiatan HBKB berlangsung.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, area zona hijau bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Pemprov DKI, terutama binaan RW, telah ditetapkan dari hasil evaluasi mingguan HBKB oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta sejak 12 Februari lalu.

Heru menambahkan, penetapan zona hijau pedagang tersebut ditujukan agar masyarakat maupun pedagang dapat beraktivitas dengan nyaman, aman, dan tertib. “Untuk teman-teman UMKM binaan Pemprov, silakan berjalan di zona hijau yang sudah disediakan. Dimohon untuk tidak berjalan di area jalan utama atau jalur

protokol ya. Supaya lajur aktivitas masyarakat juga tidak terganggu dan tetap tertib,” ujar Heru dalam keterangan resmi, Senin (4/9).

Kepala Sekretariat Presiden itu mengatakan, Pemprov DKI juga sudah menyediakan alternatif berdagang di area jalan penghubung sekitar Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin. “Kami pesan, tolong dijaga kebersihannya, dijaga ketertiban lingkungannya demi kenyamanan bersama. Semua dapat kesempatan untuk berjalan dan mempromosikan produknya dengan baik,” imbuh Heru.

Adapun sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH. Thamrin telah ditetapkan sebagai zona merah bagi para pedagang. Sementara untuk zona hijau yang ditetapkan yaitu Jalan Sunda; Jalan Kebon Kacang; Jalan Sumenep; Jalan Pamekasan; Jalan Purworejo; Jalan Blora; Jalan Teluk Betung; Jalan Galunggung; Jalan Karet Pasar Baru 3; dan Jalan Kebon Sirih.

Selain itu, jalan-jalan penghubung juga telah dikondisikan agar dapat menjadi wadah bagi para pedagang berjalan, seperti di Jalan Kebon Sirih serta Jalan Karet Pasar Baru III/V. ● yan

Ada yang Bakar Sampah, Warga DKI Bisa Lapor via Aplikasi JAKI

JAKARTA (IM) - Warga DKI Jakarta dapat melaporkan pembakar sampah ilegal melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) ataupun media sosial guna mengurangi polusi udara, demikian disampaikan Yogi Ikhwan, Humas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

DLH DKI Jakarta mengatakan, aturan terkait pembakaran sampah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. “Berdasarkan perda tersebut diatur sanksi administratif dan petugas bisa langsung menghukum pelaku dengan denda Rp 500 ribu,” kata Yogi di Jakarta pada Senin (4/9).

Pelaporan masyarakat terkait pembakaran sampah, lanjut Yogi, segera ditelusuri oleh DLH dan pelakunya bisa didenda langsung di lokasi kejadian. Petugas yang menindak pembakar sampah, kata Yogi, merupakan tim dari Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum DLH DKI Jakarta yang telah dibekali oleh surat tugas penindakan.

Yogi mengatakan, pembakaran sampah secara terbuka di Jakarta sudah tidak umum dilakukan karena keterbatasan lahan kosong atau kebun. “Tidak seperti

daerah penyangga Jakarta yang masih banyak lahan kosong,” kata Yogi.

Menurut Yogi, pembakaran sampah akan menghasilkan asap yang mengandung senyawa berbahaya seperti nitrogen oksida (NOx) dan sulfur dioksida (SO2). Proses pembakaran sampah plastik, seperti yang dijelaskan Yogi, akan menghasilkan senyawa dioksigen yang bisa menyebabkan kanker.

Aturan lain mengenai pembakaran sampah di Jakarta, kata Yogi, juga telah diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keterbatasan Umum. Dalam aturan tersebut, pembakaran sampah termasuk dalam tindak pidana ringan.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengingatkan seluruh warga Jakarta untuk mengurangi polusi udara dengan tidak membakar sampah. “Saya minta wali kota, camat, lurah untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak bakar sampah di lingkungannya,” kata Heru di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

Heru menyampaikan bahwa pengelolaan sampah akan dilakukan di tempat pembuangan sampah. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



APSC COUNCIL MEETING 2023

(Dari kiri) Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abd Kadir, Menlu Filipina Enrique A. Manalo, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, Permanent Secretary for Foreign Affairs Thailand Sarun Charoensuwan, Deputy Menlu Vietnam Do Hung Viet, Menko Polhukam RI Mahfud MD, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menlu Laos Saleumxay Kommasith, SOM Leader Brunei Darussalam Johariah Wahab, Menlu Kamboja Sok Chenda Sophea, Menlu Timor Leste Bendito dos Santos Freitas, Sekjen ASEAN Ka Kim Houn berfoto bersama saat pembukaan 27th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9).

Walhi: Kabut Air Tidak Efektif untuk Kurangi Polusi Udara di Jakarta

Penggunaan ‘water mist’ untuk mengurangi polusi udara masih belum terbukti efektif. Bahkan menurut Pegiat Kampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar, pendapat beberapa pakar, metode ini justru akan menimbulkan persoalan lain seperti terhalangnya polutan naik ke udara.

JAKARTA (IM) - Pegiat Kampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar menilai penggunaan pompa bertekanan tinggi (*water mist generator*) untuk membuat kabut air tidak efektif mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.

“Penggunaan ‘water mist’ untuk mengurangi polusi

udara masih belum terbukti efektif,” kata Ghofar saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/9).

Ghofar menuturkan menurut pendapat beberapa pakar, metode ini justru akan menimbulkan persoalan lain seperti terhalangnya polutan naik ke udara.

Menurut dia, efektivitas kabut air belum teruji secara

pasti serta penggunaan air yang berlebihan di tengah situasi musim kemarau terbilang kurang bijak lantaran air masih menjadi kebutuhan.

“Seharusnya pemerintah berfokus pada solusi pengurangan dari sumber polusi, bukan berfokus mengatasi masalah yang sudah ada dengan cara kurang efektif,” tuturnya.

Terlebih, menurut dia, inisiatif penggunaan kabut air di gedung pemerintah dan kemudian akan diperluas ke gedung-gedung milik swasta perlu dikaji ulang.

Dia menyarankan agar pemerintah mengajak swasta untuk membangun bangunan ramah lingkungan (*green building*) untuk menekan polusi udara.

“Seharusnya pemerintah menjalin kemitraan dengan swasta untuk pengurangan

sumber polusi dengan kebijakan lain seperti penerapan ‘green building,’” tuturnya.

Dia menjelaskan, konsep ramah lingkungan ini, misalnya, melalui efisiensi energi, penerapan bekerja dari rumah (*work from home/WFH*) hingga pembatasan penggunaan kendaraan pribadi bagi karyawan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membuat kabut air dari atap gedung meng-

gunakan pompa bertekanan tinggi (*water mist generator*) di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, sebagai upaya mengurangi dampak polusi udara.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memasang 30 unit alat kabut air menggunakan pompa bertekanan tinggi yang terpasang di gedung-gedung kantor wali kota hingga rumah sakit. ● yan

DLH DKI Jakarta: Uang Tilang Uji Emisi Masuk Kas Negara

JAKARTA (IM) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI memastikan uang hasil tilang uji emisi langsung masuk ke kas negara. Tidak ada sepersen pun uang tersebut masuk ke DLH DKI.

Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, nilai denda yang diberikan kepada pengendara tidak lulus uji emisi seluruhnya masuk ke kas negara.

“Nilai denda yang ditetapkan kepada masing-masing pelanggar dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Uang hasil denda tilang tersebut masuk ke kas negara,” ujar Sarjoko saat dihubungi, Senin (4/9).

Diketahui, denda tilang yang diberikan kepada pengendara tidak lulus uji emisi sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 285, dan 286, di mana pelanggaran uji emisi dikena-

kan dengan paling banyak Rp250.000 untuk motor dan mobil Rp500.000.

Sarjoko menegaskan, uang tilang tersebut tidak ada sepersen pun masuk ke DLH DKI. Uang itu pun tidak digunakan untuk mendukung program lain dalam upaya mengurangi polusi udara Jakarta.

“Tidak ada, denda tilang masuk ke kas negara sebagai penerimaan bukan pajak,” jelasnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya menggelar razia tilang uji emisi secara serentak di sejumlah dimulai pada 1 September 2023.

Polisi menegaskan penilangan dilakukan pada pengendara yang tak lolos, bukan ke pengendara yang belum melakukan uji emisi. ● yan

Bangunan Sudah Tak Layak, Atap Beton di Rusun Marunda Roboh

JAKARTA (IM) - Atap beton di Rusunawa Marunda Blok C, Jakarta Utara ambruk.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum mengatakan kondisi bangunan sudah tidak layak.

“Kejadian di Rusunawa Marunda tanggal 30 Agustus, jam 21.10 WIB. Dak Beton pada blok C5 mengalami rubuh. Lokasi sekitar hak belakang,” kata Retno kepada wartawan, Senin (4/9).

Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Retno mengatakan kondisi bangunan itu sudah diteliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hasilnya, bangunan di Blok C5 dinyatakan tidak layak.

“Seperti hasil penelitian BRIN bahwa bangunan tersebut sudah tidak layak dan kami akan revitalisasi” ujarnya.

Retno menerangkan ada 451 KK yang terdampak. Retno mengatakan warga Rusunawa Marunda Blok C itu akan direlokasi ke Rusunawa Nagrak.

“Pada Kamis, 31 Agustus 2023, disosialisasikan bahwa warga segera dipindahkan ke rusun Nagrak. Sekarang warga sudah mulai mengangkut barangnya secara bertahap,” ucapnya. ● yan



FOTO: ANTARA

SEMARAK SAMBUT KTT ASEAN 2023

Pengendara melintas di samping instalasi yang dipasang guna menyambut KTT ke-43 ASEAN 2023 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (4/9).

PT KARYA TEKNIK MULTIFINANCE					
Kantor : Jl. Kali Besar Barat No. 37 Jakarta					
LAPORAN POSISI KEUANGAN					
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah penuh)					
	2022	2021	2022	2021	
ASET					
Kas dan setara kas	98.738.909.802	94.277.186.671			
Roketang dibatasi penggunaannya	-	30.108.587.958			
Piutang sewa pembiayaan					
setelah dikurangi cadangan kerugian/nilai sebesar					
Rp 878.495.140					
(2021: Rp 30.750.710.880)					
Pihak ketiga	298.093.749.997	215.801.216.179			
Piutang lain-lain	286.646.074.544	458.021.208.572			
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1.395.906.811	577.607.372			
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar					
Rp 11.522.519.572					
(2021: Rp 10.684.085.905)					
Aset pajak tangguhan	3.250.127.943	3.185.839.095			
7.600.000.000	2.533.647.744				
JUMLAH ASET	693.511.479.855	823.505.273.591			
LIABILITAS					
Pinjaman yang diterima					
Pihak ketiga					
Utang pajak	5.349.425.924	10.933.533.606			
Beban akrual	38.450.000	1.533.050.918			
Utang pembiayaan konsumen	535.875.419	454.447.236			
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	17.862.249.800	23.991.035.226			
Pihak berelasi	-	116.859.296.617			
Kewajiban imbalan kerja	3.722.771.736	3.993.852.424			
JUMLAH LIABILITAS	27.508.772.879	265.616.242.747			
EKUITAS					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	350.000.000.000	350.000.000.000			
Tambahan modal disetor	7.600.000.000	7.600.000.000			
Penghasilan komprehensif lain	91.128.607	76.824.873			
Saldo laba	308.311.578.369	200.212.205.972			
JUMLAH EKUITAS	666.002.706.976	557.889.030.845			
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	693.511.479.855	823.505.273.592			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS					
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah penuh)					
	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif lainnya	Saldo Laba Yang Dibagikan	Jumlah
Saldo tanggal 01 Januari 2021	100.000.000.000	7.600.000.000	(481.391.344)	-	479.256.972.044
Penambahan Modal	250.000.000.000	-	-	-	250.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain	-	-	558.216.217	-	558.216.217
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	78.073.842.584	78.073.842.584
Dividen	-	-	-	(250.000.000.000)	(250.000.000.000)
Saldo tanggal 31 Desember 2021	350.000.000.000	7.600.000.000	76.824.873	-	200.212.205.972
Penghasilan komprehensif lain	-	-	14.303.734	-	14.303.734
Laba bersih tahun berjalan	350.000.000.000	7.600.000.000	91.128.607	-	108.099.372.397
Saldo tanggal 31 Desember 2022	350.000.000.000	7.600.000.000	91.128.607	-	308.311.578.369
					666.002.706.976
LAPORAN RASIO KEUANGAN					
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam %, kecuali dinyatakan lain)					
	2022	2021			
Financing to asset ratio	42,98%	26,21%			
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan yang diterima	-	95,86%			
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	198,99%	293,57%			
Rasio non-performing financing-gross	1,59%	38,87%			
Rasio non-performing financing-neto	3,00%	26,40%			
Rasio permortalan	96,03%	67,76%			
Gearing ratio	-	0,32%			
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	190,29%	159,40%			
LAPORAN RASIO KEUANGAN					
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam %, kecuali dinyatakan lain)					
	2022	2021			
LABA PER SAHAM	308,96%	224,66%			

Catatan : Informasi keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bambang, Supitjo Nugmar dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Jakarta, 5 September 2023

Direksi